

# **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Lia Nazliana Nasution<sup>1</sup>, Diwayana Putri Nasution<sup>2\*</sup>, Annisa Ilmi Faried Lubis<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi  
Jl. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan – Sumatera Utara – Indonesia – 20122

\*Korespondensi Penulis: [diwayanaputrinst@gmail.com](mailto:diwayanaputrinst@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to determine the effectiveness of fiscal policy and monetary policy in overcoming poverty in the province of North Sumatera from 1996 to 2018. The variables of the fiscal policy observed were unemployment and investment, while the observed monetary policy variables were inflation. Besides, the study was observed also variable economic growth, population, and income regional native (PAD). By using the model of Two-Stage Least Square (TSLs), the results of fiscal policy and monetary policy are effective in overcoming poverty in the province of North Sumatera are characterized by significant coefficient value.*

**Keywords:** *Fiscal Policy, Monetary Policy, North Sumatera, Poverty*

---

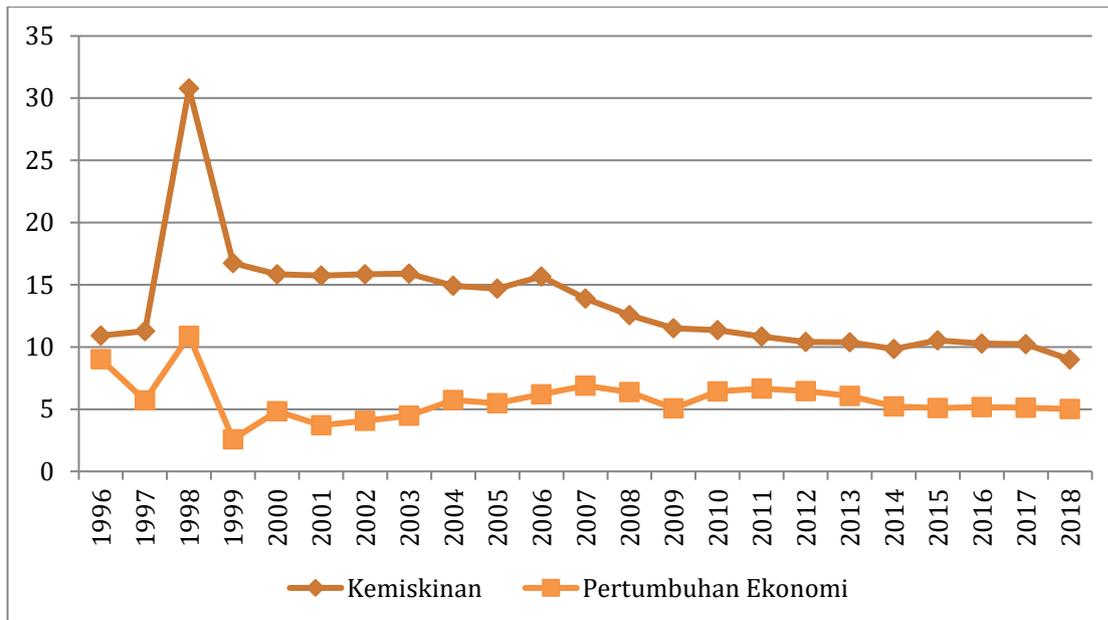
## **1. PENDAHULUAN**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Dimensi kemiskinan dapat berbentuk dari aspek ekonomi, aspek SDM, fisik/infrastruktur, masalah sosial dan keluarga/rumah tangga. Perlu diperhatikan bahwa yang dibutuhkan masyarakat miskin tidak hanya bantuan modal/materi, tetapi juga suatu kondisi yang kondusif yang memungkinkan mereka untuk membentuk jaringan sosial dan ekonomi di antara mereka sendiri. Pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seringkali merupakan lembaga yang terbaik untuk menyediakan lingkungan seperti tersebut (Sumedi dan Supardi, 2004).

Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 10 - 4 0 Lintang Utara dan 980 - 1000 Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Dengan luas wilayah yang cukup besar, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara masih perlu menjadi perhatian. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2019, persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 8,83%, dengan proporsi 8,56% di perkotaan dan 9,14% di pedesaan.



**Gambar 1.** Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1 di atas dapat diketahui bahwa pada tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuatif. Rata-rata persentase tingkat kemiskinan adalah 13,981 %. Tingkat kemiskinan yang tertinggi 30,77% pada tahun 1998 akibat krisis moneter, sedangkan tingkat kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 9,22 %. Secara keseluruhan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami penurunan meskipun lambat. Jika di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, turunnya persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tidak selalu dibarengi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Tahun 2014, ketika kemiskinan menurun dari tahun 2013, tingkat pertumbuhan ekonomi juga menurun dari tahun 2013.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan telah banyak dilakukan, seperti dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), subsidi BBM dan beras untuk masyarakat miskin, dan sebagainya. Namun, kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan tersebut masih dirasa belum terlalu maksimal. Kebijakan tersebut dilakukan secara general atau sama disetiap wilayah, padahal karakteristik wilayah satu dan lainnya berbeda. Selain itu birokrasi yang sulit karena prosedur yang terlalu panjang juga menjadi hambatan.

Oleh karena itu perlu adanya kebijakan penanganan kemiskinan yang lebih ekstensif dari berbagai pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektif kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Sumedi dan Supardi, 2004). Sedangkan menurut Chamsyah (2006) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi hidup yang merujuk pada keadaan kekurangan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang dikatakan miskin, apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau suatu kelompok hidup dibawah garis kemiskinan dengan standar hidup yang rendah. Sebagai akibat dari standar hidup yang relatif rendah karna tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan yang parah, dan lain-lain. Sebutan standar hidup adalah manifestasi perbandingan jumlah pendapatan, perumahan, pendidikan, kesehatan, angka kematian, serta peluang mendapat pekerjaan (Todaro, 2000)

Kemiskinan menurut *World Bank* merupakan keadaan dimana seorang individu atau kelompok

tidak memiliki pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya. Standar rasio tingkat kemiskinan yang ditetapkan oleh *WorldBank*.

Chamber (2010) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi sedangkan kelima dimensi tersebut membentuk suatu perangkap kemiskinan (*deprivation trap*), yaitu:

1. Kemiskinan itu sendiri,
2. Ketidakberdayaan (*powerless*),
3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*),
4. Ketergantungan (*dependency*), dan
5. Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis

Dari definisi diatas diperoleh pengertian bahwa kemiskinan merupakan kondisi hidup seseorang yang merujuk pada keadaan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup pokoknya dan tidak dapat menikmati kehidupannya dalam hal kesehatan, ibadah menurut agamanya, pendidikan, pekerjaan, pendapatan yang tinggi dan standar hidup yang layak.

Mengidentifikasi mengenai penyebab kemiskinan, terdapat banyak versi. Menurut Kuncoro (2010:107) dipandang dari sisi ekonomi penyebab kemiskinan antara lain, Pertama, secara mikro kemiskinan timbul akibat ketidaksamaan pola pemikiran sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan timbul akibat ketidaksamaan dalam kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses modal.

Menurut Jhingan (2010:18) terdapat empat faktor yang menjadi penyebab terjadinya fenomena kemiskinan, yaitu :

1. Rendahnya tingkat pendidikan
2. Rendahnya derajat kesehatan
3. Terbatasnya lapangan kerja
4. Kondisi keterisolasian

### **Ukuran Kemiskinan**

Menurut BPS, tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah) dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Secara sederhana dan umumnya ukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Kemiskinan Absolut  
Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.
2. Kemiskinan Relatif  
Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.
3. Kemiskinan Kultural  
Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 1996 sampai dengan 2018 (23 tahun). Model analisis menggunakan persamaan simultan. Adapun persamaannya yaitu sebagai berikut:

$$\text{Log (PENG)} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Log (JMP)} + \alpha_2 \text{Log (INV)} + \alpha_3 \text{INF} + \alpha_4 \text{KMS} + e_1 \quad (1)$$

$$\text{KMS} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Log (PAD)} + \alpha_2 \text{PRE} + \alpha_3 \text{Log (PENG)} + e_2 \quad (2)$$

dimana :

KMS	=	Kemiskinan (%)
INF	=	Inflasi (%)
PRE	=	Pertumbuhan Ekonomi (%)
PENG	=	Pengangguran (Jiwa)
JMP	=	Jumlah Penduduk (Jiwa)
INV	=	Investasi (Milyar Rupiah)
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$	=	Koefisien regresi
$e_1, e_2$	=	<i>error term</i>

Setelah dilakukan identifikasi simultan pada persamaan pertama berada pada kondisi *exactly identification*. Dan persamaan kedua berada pada kondisi *over identification*. Maka persamaan tersebut sudah memenuhi karakteristik yang tepat sehingga model 2SLS (*Two Stage Least Square*) harus memenuhi syarat asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian yaitu uji normalitas data dan uji autokorelasi.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Uji *Two Stage Least Square* (TSLS)

**Tabel 1.** Koefisien TSLS

Variable	Coefficient	Prob.
C(10)	1.866161	0.0458
C(11)	0.106240	0.0479
C(12)	-0.032284	0.0077
C(13)	0.069079	0.0494
C(14)	0.444517	0.0052
C(20)	1.971083	0.0579
C(21)	-0.042807	0.0041
C(22)	-0.210389	0.0569
C(23)	0.695012	0.0375

Sumber: Eviews v.10

**Tabel 2.** Hasil Estimasi TSLS

Persamaan 1		
R squared	Adjusted R squared	Durbin-Watson stat
0.380402	0.242713	0.418335
Persamaan 2		
R squared	Adjusted R squared	Durbin-Watson stat
0.372920	0.273907	0.913075

Sumber: Eviews v.10

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa koefisien regresi untuk jumlah penduduk positif 0.106 dan signifikan mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap jumlah penduduk sebesar 1 persen maka pengangguran akan mengalami kenaikan sebesar 0.106 persen. Koefisien regresi

untuk investasi negatif -0.032 dan signifikan mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap investasi sebesar 1 persen maka pengangguran akan mengalami penurunan sebesar 0.032 persen. Koefisien regresi untuk inflasi positif 0.069 dan signifikan mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap inflasi sebesar 1 persen maka pengangguran akan mengalami kenaikan sebesar 0.069 persen. Koefisien regresi untuk kemiskinan positif 0.444 dan signifikan mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap kemiskinan sebesar 1 persen maka pengangguran akan mengalami kenaikan sebesar 0.444 persen.

Pada Tabel 2, nilai R squared pada persamaan pertama sebesar 0.380402 atau 38% artinya variabel jumlah penduduk, investasi, inflasi, dan kemiskinan hanya mampu mempengaruhi pengangguran sebesar 38% sedangkan sisanya sebesar 62% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian.

Untuk persamaan kedua, diketahui bahwa koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) negatif -0.042 dan signifikan mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap PAD sebesar 1 persen maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0.042 persen. Koefisien regresi untuk pertumbuhan ekonomi negatif -0.210 dan signifikan mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0.210 persen. Koefisien regresi untuk pengangguran positif 0,695 dan signifikan mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap pengangguran sebesar 1 persen maka kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0,695 persen.

Nilai R-squared persamaan kedua sebesar 0.372920 atau 37% artinya variabel PAD, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran hanya mampu mempengaruhi kemiskinan sebesar 37% sedang kan sisanya sebesar 63% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan metode TSLS, maka dapat disimpulkan bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan moneter efektif dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Apabila kemiskinan berkurang, maka akan berdampak besar bagi perekonomian seperti berkurangnya pengangguran, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dan sebagainya. Bagi pemerintah provinsi, ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan di waktu yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara dalam Angka Berbagai Tahun terbitan, BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Chamsyah, Bachtiar 2006, Teologi Penanggulangan Kemiskinan, RM-Books, Jakarta.
- Chamber, Robert. 2010. Paradigms, Poverty, and Adaptive Pluralism. IDS Working Paper Vol. 2010 Issue 344.
- Jhingan, M.L, 2010, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan, UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Sumedi dan Supardi, 2004, "Kemiskinan di Indonesia : Suatu Fenomena Ekonomi"
- Todaro, M.P, 2000, "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga", Edisi VII, Erlangga, Jakarta.